

**TESIS**

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT  
TEORI KEADILAN**



**GRETA MARIA OSORIO SOARES**  
**No. Mhs:215214474/PS/MIH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2024**



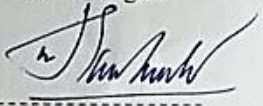
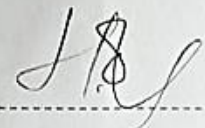
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Greta Maria Osorio Soares  
Nomor Mahasiswa : 215214474  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : **PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT TEORI  
KEADILAN**

**Disetujui oleh:**

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. <u>Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.</u>	<u>30 Agustus 2024</u>	
2. <u>Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.</u>	<u>18 September 2024</u>	



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : GRETA MARIA OSORIO SOARES  
Nomor Mahasiswa : 215214474  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK  
DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT TEORI Keadilan

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 1 Oktober 2024.

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	
3. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.	

**Ketua Program Studi**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Elviana Christiani, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GRETA MARIA OSORIO SOARES

Nomor Mahasiswa : 215214474

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“PERBANDINGAN PENGATURAN HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE DARI SUDUT TEORI KEADILAN”** adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, September 2024

Yang menyatakan,

Greta Maria Osorio Soares

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste Dari Sudut Teori Keadilan”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, memberikan saran dan dukungan dalam proses penulisan tesis ini dari awal hingga akhir, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M Selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan masukan, arahan dan saran selama proses penulisan tesis ini.
3. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan masukan, arahan dan saran selama proses penulisan tesis ini .
4. Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum selaku dosen penguji yang memberikan masukan, arahan dan juga saran yang membangun.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Suami tercinta Berto yang selalu mendoakan, mendukung dan menemani penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
7. Kedua Orang Tua dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta,        September 2024

Greta Maria Osorio Soares

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN TESIS .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Batasan Konsep .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	19
1. Konsepsi Negara Hukum .....	19
2. Hak Asasi Manusia .....	20
3. Aparatur Sipil Negara .....	21
4. Pengertian Hak Politik .....	24
5. Pemerintahan Yang Baik .....	25
B. Landasan Teori .....	26
1. Teori Hak Asasi Manusia .....	26
2. Teori Keadilan .....	28
<b>BAB III CARA PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Pendekatan Penelitian .....	35
3. Data Penelitian .....	36

4. Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian .....	37
5. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perbandingan Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia dan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste dari Sudut Teori Keadilan .....	
	39
1. Hak Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	39
1.1 Hak Asasi Manusia .....	39
1.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	42
1.3 Hak Politik Menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik .....	46
2. Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia .....	51
3. Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste .....	55
4. Perbandingan Hak Politik PNS Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste .....	58
B. Dasar Dibatasinya Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia .....	
	65
1. Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Politik	
a. Hak Politik .....	65
b. Sejarah Hak Sipil dan Hak Politik .....	67
2. Pembatasan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil .....	72
2.1 Alasan Pembatasan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil .....	75
C. Analisis Teori Keadilan Dalam Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Demokratik Timor Leste .....	
	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Hak PNS dan Hak Politik PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 .....	53
Tabel 2. Perbandingan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste .....	59
Tabel 3. Perbandingan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia dan Negara Demokratik Timor Leste .....	60

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan hak politik ASN Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste yang kemudian dalam pembatasan hak politik PNS dalam konstitusi negara ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan melihat satu peraturan dengan peraturan lainnya serta bagaimana penerapan peraturan- peraturan tersebut dalam dalam prakteknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste tidaklah jauh berbeda, akan tetapi dalam kedua negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil. Analisis penulisan ini ditinjau dari teori keadilan John Rawls untuk mengetahui apakah memungkinkan pembatasan Hak Politik ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak politik ASN untuk melindungi kebebasan yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Pembatasan Hak Politik PNS bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh PNS yang dapat menimbulkan konflik sehingga menciptakan ketidakadilan yang lebih besar.

**Kata Kunci: Hak Politik, PNS, Teori Keadilan John Rawls**

## ABSTRACT

*This study aims to find out how the political right of civil servants of the Republic of Indonesia and the Democratic Republik of Timor Leste are regulated in limitation of civil servant political rights in the state constitution in terms of John Rawls's theory of justice. This research is a normative legal research that uses secondary data as the main source. The data obtained is analyzed by looking at one regulatioan with other regulations and how these regulations are applied in practice. This research shows that the regulation of Political Rights of Civil Servants of the Republik of Indonesia and the democratis Republic of Timor Leste is not much different, but both countries have their own consideration in limiting the political rights of civil servants. The analysis of this writing is viewed from John Rawls' theory of justice to find out whether it is possible to limit the political rights of Civil Servants. The results show that restrictions on the political rights of Civil Servants are to protect freedoms that can cause injustice. Restrictions on the political rights of Civil Servants aim to prevent the abuse of power by civil servants, which can lead to conflicts that create greater injustice.*

***Keyword: Political Rights, Civil Servants, John Rawls' Theory of Justice***